



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
SUB UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FIRLI BAHURI
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
3. NHK : 15572

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 10.443.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 317 m2/184 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.436.500.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 412.500.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 412.500.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 412.500.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 412.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/87 m2 di BEKASI, WARISAN Rp. 2.400.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 612 m2/342 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.727.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/360 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 632.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOBIL, TOYOTA LC RADO 27AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI



Rp. 400.000.000

4. MOBIL, KIA SPORTAGE 2.0 GAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI

Rp. 140.000.000

5. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

7.150.424.386

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

18.226.424.386

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

18.226.424.386

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.